	NOMOR SOP	W.27-105.OT.02.02 Tahun 2025			
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Oktober 2025			
	TANGGAL REVISI				
	TANGGAL EFEKTIF	01 Oktober 2025			
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA			
		TOPAN SOPUAN, S.SOS., SH., MH 19741225 200312 1 001			
	NAMA SOP:	SOP Pengelolaan Atas Keberatan Informasi			
		1 cingeroraum Aus Reservatum informasi			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	OCT T SINGER THAT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH			
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahur 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Te	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya			
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahur 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Te	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya rtentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer			
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahur 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Te 3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya rtentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer			
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum KETERKATAN: SOP Layanan Permintaan Informasi Publik SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik SOP Pendokumentasian Informasi Publik	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahur 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Te 3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang PERALATAN / PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Akses internet 3. Printer, Scanner 4. Formulir Keberatan Informasi Publik	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya rtentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ATAS KEBERATAN INFORMASI

		PELAKSANA					MUTU BAKU				
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID	Atasan PPID	PPID Pelaksana Satuan Kerja	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan mencantumkan alasan keberatan pada formulir pengajuan keberatan	Mulai						Formulir/surat pengajuan keberatan Dokumen identitas pemohon	10 menit	Formulir/surat pengajuan keberatan Dokumen identitas pemohon	Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui : 1. Permohonan langsung (tatap muka) 2. Website PPID 3. Surat resmi
2	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan keberatan dan melakukan pencatatan dalam buku register keberatan							Formulir/surat pengajuan keberatan Dokumen identitas pemohon	10 menit	Berkas pengajuan keberatan Daftar register	
3	Memproses tanggapan atas pengajuan keberatan informasi publik			→	+	+		Berkas pengajuan keberatan lengkap	25 hari kerja	Disposisi	
4	Meny ampaikan bahan informasi kepada PPID				+			Bahan informasi y ang telah tersedia; dan/atau Surat tanggapan atas keberatan informasi publik		Surat tanggapan atas keberatan informasi publik	Surat tanggapan atas keberatan ditandatangani oleh Atasan PPID Kementerian Hukum
5	Meny ampaikan tanggapan kepada pemohon	Puas	•					Surat tanggapan atas keberatan informasi publik	10 menit	Surat tanggapan atas keberatan inf ormasi publik	
6	Menerima tanggapan atas pengajuan keberatan informasi publik	Selesai				Tidak	c Puas	Surat tanggapan atas keberatan informasi publik		Informasi diterima	Penyampaian tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima pengajuan keberatan dari pemohon
7	Mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi										Dalam hal pemohon tidak puas atas tanggapan yang diberikan, pemohon dapat mengajukan permohonan peny elesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi
	TOTAL WAKTU								25 hari 30 menit		

